

**PENGAWASAN BAPPEBTI (BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA  
KOMODITI) TERHADAP PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA DALAM HAL  
TINDAKAN MENYALAHGUNAKAN DANA NASABAH**

**JURNAL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**MARTINA RATNA PARAMITHA SARI**

**NIM. 0910110049**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2013**

# PENGAWASAN BAPPEBTI (BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI) TERHADAP PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA DALAM HAL TINDAKAN MENYALAHGUNAKAN DANA NASABAH

Martina Ratna Paramitha Sari  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Email: [martina91ratna@ymail.com](mailto:martina91ratna@ymail.com)

## *Abstract:*

*BAPPEBTI supervision on futures trading broker who abuse customer funds should be monitored for an effective law enforcement. This study research aims to determine the form of control taken by BAPPEBTI to futures trading broker who misuse customer funds both preventive and repressiv. The other aim of this study are to know the obstacles faced by BAPPEBTI in conducting surveillance and to know the efforts that have been made by BAPPEBTI to overcome barriers in controlling the actions of futures trading broker who misuse customer funds. This research was conducted with juridical-sociological method. The study results conclude that surveillance BAPPEBTI against futures trading broker who misuse customer funds is still ineffective because any obstacles in an enforcement, specifically: a.)Lack of public awareness and knowledge about the activities of commodity futures trading and commodities trading activities of regulatory named BAPPEBTI. b.)Conflict of authorities between BAPPEBTI and POLRI in conducting both the police and BAPPEBTI. c.)Lack of Human Resources in investigators, inspectors, and supervisors team. d.)Presence and marketing power brokers who are less prudent in attracting potential customers. e.)Lack of knowledge of the brokerage company marketing personnel. In order to minimalized those barriers, there are some suggestions of efforts, which are : a.)Making BAPPEBTI to be more proactive. b.)To expand BAPPEBTI's range. c.)Allocation the responsibilities between two of institutions among BAPPEBTI and the cops. d.)Make a specific team of investigators, inspectors, and the supervisors with special training or special education. e.)Manage more information about this related issue, and making regulations about minimal standards for prospectives client and high selections qualification for recruiting the competencies of marketing employees indeed.*

## *Key Words:*

*BAPPEBTI, Futures Trading Broker, Abuse Customer Funds*

## Abstraksi:

Pengawasan BAPPEBTI terhadap pialang perdagangan berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah masih harus dipantau demi terciptanya penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAPPEBTI terhadap tindakan pialang perdagangan berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah baik secara preventif maupun represif, mengetahui hambatan yang dihadapi oleh BAPPEBTI dalam melakukan pengawasan dan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh BAPPEBTI untuk mengatasi hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan pialang perdagangan berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-sosiologis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan BAPPEBTI terhadap pialang perdagangan berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah masih kurang optimal. Hal ini dikarenakan terdapat hambatan dalam penagakannya, antara lain : a.)Kurang tahunya masyarakat mengenai kegiatan perdagangan berjangka komoditi dan badan pengawas kegiatan perdagangan komoditi yaitu BAPPEBTI. b.)Adanya benturan

kewenangan di dalam melakukan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dengan BAPPEBTI. c.)Terbatasnya Sumber Daya Manusia di dalam tim penyidik, pemeriksa, dan pengawas. d.)Adanya tenaga marketing dan pialang yang kurang jeli di dalam menjaring para calon nasabah. e.)Kurangnya pengetahuan para tenaga marketing perusahaan pialang. Untuk mengurangi hambatan tersebut, dilakukannya beberapa upaya, antara lain : a.)BAPPEBTI lebih proaktif. b.)Memperluas jangkauan BAPPEBTI. c.)Pembagian kewenangan secara tegas diantara dua institusi, yaitu BAPPEBTI dan juga Kepolisian d.)Penjaringan khusus tim penyidik, pemeriksa, dan pengawas dengan mengadakan pelatihan khusus atau pendidikan khusus. e.)Mengatur lebih lanjut hal yang berkaitan seperti membuat aturan mengenai standar minimal calon nasabah dan juga dalam merekrut seorang tenaga marketing harus dilakukan seleksi yang ketat.

Kata Kunci: BAPPEBTI, Pialang Perdagangan Berjangka, Penyalahgunaan Dana Nasabah

## PENDAHULUAN

Kegiatan penanaman modal bukanlah hal yang baru, karena sudah sejak zaman dahulu masyarakat melakukan berbagai bentuk investasi, hanya saja bentuk investasi pada zaman dahulu berbeda dengan bentuk investasi di zaman sekarang ini. Dalam berinvestasi secara umum dikenal adanya prinsip bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan maka semakin tinggi pula tingkat resiko yang kemungkinan dihadapi, dan sebaliknya.<sup>1</sup>Resiko hukum merupakan resiko yang timbul karena kontrak dalam berinvestasi tidak dapat dilaksanakan, termasuk resiko yang timbul karena tidak memadainya dokumentasi, ketidakcakapan, ketidakpastian hukum, dan karena adanya kepailitan atau *insolvensi*.<sup>2</sup>Berawal dari adanya kasus pelanggaran pialang berjangka mengenai tindakan menyalahgunakan dana nasabah di rekening terpisah, skripsi ini akan membahas lebih lanjut mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BAPPEBTI terhadap adanya kasus pelanggaran terkait penyalahgunaan dana nasabah di rekening terpisah yang dilakukan oleh pialang perdagangan berjangka.

Perdagangan berjangka komoditi merupakan salah satu alternatif investasi (*investment enhancement*) bagi perorangan dan perusahaan yang memiliki kebebasan dalam hal finansial untuk melakukan kegiatan investasi. Peristiwa-peristiwa sebagai bentuk perbuatan melawan hukum bermunculan, diantaranya: menyalahgunakan dana nasabah di rekening terpisah, tidak mendaftarkan seluruh transaksi ke bursa, tidak memenuhi ketentuan mengenai wakil pialang dan tidak dapat memfasilitasi penyampaian amanat dari para nasabahnya.<sup>3</sup>

Dewasa ini berkembang pasar yang disebut pasar keuangan yang dikembangkan sehingga orang atau institusi dapat mengubah keterbukaan resiko terhadap peristiwa yang mengubah kemungkinan penghasilan potensial. Salah satu produk inovasi yang diperkenalkan dalam bisnis keuangan adalah produk derivatif. Istilah derivatif merupakan istilah general untuk sejumlah instrumen keuangan. Transaksi derivatif pun telah terjadi sejak tahun 2000 SM. Transaksi derivatif ini berkembang pesat sejak era 80-an dengan mengandung resiko yang besar. Kemampuan dari transaksi derivatif untuk meningkatkan efisiensi ekonomi adalah dengan cara mengalihkan resiko pada pihak-pihak yang mau menangani resiko. Pasar tempat transaksi derivatif dilakukan terdiri atas pasar *over-the-counter* (OTC) dan bursa (*exchange-traded*). Kedua pasar tersebut sebagai sarana mengelola dan melindungi (*hedge*) tingkat bunga, mata uang, saham dan juga komoditi. Masing-masing

<sup>1</sup> Jusuf Anwar, **Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi**, PT. Alumni. Bandung, 2008, hal 9.

<sup>2</sup> Lie Ricky Ferlianto, dkk, **Komoditi Investasi Paling Prospektif**, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, hal 95-98.

<sup>3</sup> Lie Ricky Ferlianto, dkk, **Komoditi Investasi...**, hal 32.

pasar tersebut memiliki pola transaksi dan resiko serta masalah hukum yang berbeda. Pasar bursa merupakan suatu forum yang diregulasikan di mana produsen, pedagang, hedger dan spekulasi dapat melindungi diri terhadap kenaikan harga, mencari keuntungan dari fluktuasi harga dengan memperdagangkan bentuk kontrak standar dari transaksi derivatif.<sup>4</sup>

Keuntungan dari transaksi bursa ini diantaranya likuiditas, harga yang transparan dan kompetitif, rendahnya biaya transaksi dan manajemen resiko. Pasar bursa transaksi derivatif di Indonesia adalah Bursa Berjangka Komoditi dan Pasar Modal. Sedangkan derivatif OTC adalah kontrak yang dinegosiasikan secara privat antara dua pihak atau lebih sesuai dengan syarat yang ditetapkan para pihak yang bergantung pada nilai dari aset yang mendasarinya, tingkat referensi atau index. Kelemahan dari OTC ini adalah kurangnya likuiditas, harga kurang transparan dan kurang kompetitif dengan persyaratan yang kompleks yang mengakibatkan terjadinya kurang pemahaman secara menyeluruh mengenai implikasi kontrak oleh salah satu pihak, khususnya nasabah. Karena kelebihan yang dimiliki oleh bursa lebih menjanjikan dalam transaksi derivatif, terdapat beberapa investor yang melirik pasar bursa dalam menginvestasikan dananya.<sup>5</sup>

Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai pasar bursa merupakan kegiatan bisnis yang kompleks yang melibatkan beberapa pihak di dalamnya. Dalam kegiatannya diperlukan dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan terutama dalam hal penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan oleh pialang berjangka. Oleh karena itu, Perdagangan Berjangka Komoditi diatur dalam bentuk Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam pasal 51 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan bahwa dana milik nasabah wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh BAPPEBTI. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dari BAPPEBTI dalam rangka mengurangi adanya penyalahgunaan dana nasabah yang pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 belum diatur mengenai pemisahan rekening tersebut.

Seluruh kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan pialang perdagangan berjangka dibawah izin dan pengawasan BAPPEBTI. Pengaturan dan pengawasan yang ada tersebut sebenarnya semata-mata merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita

---

<sup>4</sup> Dian Ediana, **Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia**, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hal 70-75

<sup>5</sup> Dian Ediana, **Transaksi Derivatif dan Masalah....**,hal 76-80.

negara yaitu dengan cara meningkatkan kegiatan di sektor perdagangan. Kegiatan perdagangan ini semata-mata dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menunjang pembangunan suatu negara.

Dikarenakan perdagangan komoditi yang merupakan kekayaan alam ini ada keterkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan adanya tuntutan publik terhadap dunia investasi dalam era globalisasi yang semakin tinggi pada aspek transparansi, diperlukannya proses penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum ini, aspek pengawasan akan menjadi bagian penting dari penegakan hukum yang efektif.<sup>6</sup> Tanpa adanya pengawasan, regulasi yang dilahirkan akan begitu sia-sia. Oleh karena itu, perlulah adanya pengawasan terhadap seluruh kegiatan perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan oleh lembaga pengawas tersendiri yaitu BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Oleh karena itu, dalam jurnal ilmiah ini penulis mengangkat judul **“Pengawasan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah”**

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAPPEBTI terhadap pialang perdagangan berjangka dalam hal tindakan penyalahgunaan dana nasabah?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh BAPPEBTI dalam melakukan pengawasan terhadap pialang perdagangan berjangka dalam hal tindakan penyalahgunaan dana nasabah?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BAPPEBTI untuk mengatasi hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan pialang perdagangan berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah?

#### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAPPEBTI terhadap tindakan pialang perdagangan berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah baik secara preventif maupun represif.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh BAPPEBTI dalam melakukan pengawasan terhadap pialang perdagangan berjangka dalam hal tindakan penyalahgunaan dana nasabah.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh BAPPEBTI untuk mengatasi hambatan dalam melakukan

---

<sup>6</sup> Jusuf Anwar, **Pasar Modal Sebagai Sarana...**, hal 219.

pengawasan terhadap tindakan pialang perdagangan berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menggali dan menganalisa ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya terhadap pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) terhadap pialang perdagangan berjangka yang melakukan tindakan penyalahgunaan dana nasabah. Pendekatan Sosiologis digunakan untuk menggali data-data dan informasi mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan BAPPEBTI terkait dengan kewenangannya di dalam melakukan pengawasan terhadap pialang perdagangan berjangka khususnya yang menyalahgunakan dana nasabah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sejarah BAPPEBTI**

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu unit eselon I berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, sebelum BAPPEBTI dibentuk secara resmi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tersebut, tugas, fungsi, dan kewenangan BAPPEBTI dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi atau Bapebti yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi, bernaung di bawah Departemen Perdagangan pada waktu itu. Jadi secara kelembagaan, BAPPEBTI yang ada sekarang sebenarnya adalah merupakan pengalihan fungsi dari Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti).

BAPPEBTI (dengan 2 "P") secara resmi dibentuk pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 115 Tahun 1999 yang kemudian telah diperbaharui beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001. Demikian pula struktur organisasi dan uraian tugas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI dipimpin seorang Kepala Badan dan dibantu seorang Sekretaris Badan serta 4

Kepala Biro yang terdiri dari: Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Perniagaan, Kepala Biro Analisis Pasar, dan Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa. Organisasi BAPPEBTI didasarkan pada Keputusan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/ 7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.<sup>7</sup>

## **B. Ketentuan terkait dengan pengawasan oleh BAPPEBTI**

Pengawasan yang harus dilakukan oleh BAPPEBTI ini sendiri tercantum di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan,

“Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh BAPPEBTI”

Makna dari “pengaturan” dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah pengaturan teknis yang dilakukan oleh BAPPEBTI dalam membuat peraturan pelaksanaan teknis sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. BAPPEBTI juga memberikan petunjuk sesuai dengan perkembangan kegiatan sehari-hari di pasar agar kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka ataupun Kontrak Derivatif lainnya dalam Sistem Perdagangan Alternatif dapat terlaksana secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan. Di samping itu, para pelakunya perlu dibina melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang cukup, baik yang dilaksanakan sendiri maupun bekerja sama dengan berbagai institusi lain. Semua pelaku di pasar diharapkan telah lulus tes pengetahuan tentang Komoditi dan Perdagangan Berjangka.

Untuk menjamin bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pengawasan yang dilakukan setiap hari terhadap kegiatan di Bursa Berjangka ataupun dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Pengawasan sehari-hari dapat dilakukan secara langsung di lapangan dan/atau melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan kepada BAPPEBTI. Kegiatan pengawasan itu dapat pula dilakukan secara preventif, seperti pembuatan tata tertib, pedoman pelaksanaan, arahan, dan bimbingan serta secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.

---

<sup>7</sup> BAPPEBTI Kementerian Perdagangan Republik Indonesia BAPPEBTI/Ar/44/V/2012, *Annual Report 2011*, BAPPEBTI.go.id. diakses tanggal 25 Juli 2012 19.50



## C. Pelaksanaan pengawasan oleh BAPPEBTI

### C.1 Kasus terkait dengan penyalahgunaan dana nasabah di rekening terpisah

Dalam transaksi di industri Perdagangan berjangka komoditi terdapat dua sistem transaksi yaitu, sistem transaksi perdagangan bilateral dan juga sistem transaksi perdagangan multilateral. Transaksi multilateral merupakan sistem perdagangan yang memfasilitasi pertukaran instrumen keuangan antara beberapa pihak (*many to many*) transaksi ini berupa transaksi di pasar bursa. Sedangkan sistem transaksi bilateral merupakan sistem perdagangan antara dua pihak yang memiliki resiko tinggi dan transaksi ini merupakan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA).<sup>8</sup> Terdapat beberapa kasus pelanggaran terutama penyalahgunaan dana nasabah di dalam rekening terpisah terjadi di dalam sistem transaksi bilateral yaitu Sistem Perdagangan Alternatif. Berikut dua perusahaan pialang yang diduga melakukan penyalahgunaan dana nasabah di rekening terpisah, yaitu PT. ABC Futures dan PT. XYZ Futures, nama perusahaan disamarkan terkait dengan kode etik dan nama baik perusahaan. Pelanggaran yang dilakukan dapat dipisah dalam dua kategori, yaitu penyalahgunaan dana nasabah sebelum masuk ke dalam rekening terpisah dan penyalahgunaan dana nasabah setelah masuk ke dalam rekening terpisah.

Amandemen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi antara lain didorong oleh kenyataan bahwa transaksi kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral atau yang dikenal dengan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) selama beberapa tahun terakhir ini sangat mendominasi transaksi Kontrak Berjangka di Bursa. Disamping itu cakupan komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan juga telah berkembang semakin luas. Transaksi SPA sepanjang tahun 2011 mencapai hampir 90% dari keseluruhan transaksi yang terjadi di Bursa, sementara di tahun 2010 mencapai angka mendekati 96%. Karena itulah SPA dimasukkan menjadi bagian yang harus diregulasi agar para pesertanya (investor) memperoleh perlindungan serta kepastian hukum.

Bentuk perlindungan yang diberikan dalam kaitan dengan SPA adalah diterapkannya Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan Sistem Perdagangan dalam transaksi SPA. Sistem Pengawasan Tunggal merupakan sistem yang digunakan dalam pengawasan terpadu secara elektronik oleh BAPPEBTI, Bursa Berjangka, dan Lembaga Kliring Berjangka

---

<sup>8</sup> PT. Saint Technologies Indonesia, **Menuju Perdagangan Komoditi Online**, Percetakan El-Syarif, Jakarta, 2011, hal 34-35.

terhadap integritas pasar dan integritas keuangan dalam penyelenggaraan SPA yang terhubung secara on-line dan real time dengan setiap Sistem Perdagangan dalam transaksi SPA. Konsep sistem transaksi multilateral di lantai bursa dengan sistem transaksi bilateral SPA ini memang berbeda namun mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap dua transaksi ini tetap sama.

### **C.2 Bentuk Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI**

Pengawasan dapat dilakukan dari berbagai segi, baik dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan atau pun segi saat/waktu dilaksanakannya. Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI dalam rangka mengawasi tindakan pialang berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah dalam hal ini dilakukan dari segi waktu dilaksanakannya, yaitu pengawasan secara preventif yang merupakan pengawasan terhadap keputusan-keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya, dan juga pengawasan secara represif dimana keputusan-keputusan badan-badan yang bertingkat lebih rendah akan dicabut kemudian apabila bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan umum. Dari uraian tersebut, dapat dilihat pengawasan apa saja yang dilakukan oleh BAPPEBTI dalam rangka mengawasi pialang berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah. Pengawasan tersebut diantaranya :

#### **1. Pengawasan Preventif<sup>9</sup>**

Pengawasan preventif dilakukan dengan cara diantaranya :

- a) Pelatihan Teknis
- b) Kepatuhan Keuangan
- c) Evaluasi Laporan Direktur Kepatuhan
- d) Audit Pelaku Usaha
- e) Pengawasan Dan Evaluasi Transaksi Pelaku Usaha
- f) Evaluasi Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka

#### **2. Pengawasan Represif**

Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI tidak hanya secara preventif, namun juga secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Pengawasan represif yang dilakukan dalam pemeriksaan dilakukan dengan *Standard Operating Procedure*. Sebagai salah satu cara untuk lebih meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap PBK,

---

<sup>9</sup> BAPPEBTI Kementerian Perdagangan Republik Indonesia BAPPEBTI/Ar/44/V/2012, *Annual Report 2011*, hal 56.

secara konsisten BAPPEBTI terus berupaya melakukan penegakan hukum terhadap para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum dimaksud, BAPPEBTI memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, serta *undercover* atau penyamaran terhadap para pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tentang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya. Sedangkan pengawasan secara represif dilakukan pula dengan adanya pengenaan sanksi terhadap pelanggaran. Tindakan dari BAPPEBTI sebagai badan pengawas memberi peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin usaha, dan denda merupakan bentuk pengawasan secara represif.<sup>10</sup>

### **C.3 Hambatan yang dihadapi oleh BAPPEBTI dalam melakukan pengawasan**

Di dalam melakukan sebuah pengawasan tidak terlepas dari hambatan. BAPPEBTI sendiri di dalam melakukan pengawasan menemui hambatan-hambatan tersebut, baik berupa hambatan yuridis maupun hambatan non yuridis. Dalam rangka mengetahui hambatan yang dihadapi BAPPEBTI dalam melakukan pengawasan, penulis melakukan wawancara dengan pihak yang memiliki kompetensi di dalam melakukan pengawasan. Berikut petikan wawancara penulis ketika mewawancarai Kepala Bagian Pelanggaran Transaksi BAPPEBTI, bapak Veri Aggrijono ,

*Hambatan yang dihadapi BAPPEBTI ketika melakukan pengawasan diantaranya adalah banyak masyarakat di daerah yang tidak tahu ketika ada pelanggaran harus mengadu kepada siapa. Karena di daerah-daerah itu tidak ada kepanjangan tangan dari BAPPEBTI, hanya menempel dari kementerian perdagangan. Banyak pula pegawai disperindag ditempati orang-orang yang bukan berlatar belakang perdagangan sehingga mereka juga tidak tahu harus melapor ke mana, di disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) atau di kepolisian sehingga jika terjadi permasalahan hukum dalam bidang perdagangan berjangka ini dilaporkan kepada pihak kepolisian, maka dilakukan penyidikan oleh kepolisian, di tengah jalan ternyata kasus tersebut merupakan pelanggaran kegiatan di Industri Perdagangan Berjangka Komoditi. Setelah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, BAPPEBTI sendiri sudah tidak dapat melakukan tindakan awal lagi. Namun terkait dengan adanya penipuan sudah ada kesepakatan untuk ditangani kepolisian. Kalau memang murni pelanggaran tindak pidana di Perdagangan Berjangka Komodit pihak BAPPEBTI yang berhak menangani. Adanya keterbatasan SDM penyidik BAPPEBTI. Harusnya BAPPEBTI memiliki staf pengawas, jadi sebelum melakukan proses penyidikan, bukan penyidik yang melakukan pengawasan melainkan staf pengawas tersebut*

---

<sup>10</sup> BAPPEBTI, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, BAPPEBTI/Ar/44/V/2012 Annual Report 2011.hal 25

*yang melakukan pengawasan. Setelah pengawas tersebut melakukan pengawasan dan memperoleh bukti yang cukup barulah dilimpahkan pada penyidik.<sup>11</sup>*

Selain melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Pelanggaran Transaksi, penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Pelanggaran Administratif yang juga pernah berpengalaman dan menjabat sebagai Kepala Bagian Pelanggaran Transaksi, yaitu Bapak Muallim Syuib, S.H., M.H. Beliau mengutarakan hambatan yang dialami oleh BAPPEBTI di dalam melakukan pengawasan, berikut ringkasannya

*Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI selama ini memang dirasakan kurang optimal, hal ini juga dikarenakan banyak faktor dan hambatan yang dihadapi oleh BAPPEBTI itu sendiri. Pertama, BAPPEBTI yang tugasnya mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi terhambat dengan kurang dikenalnya Perdagangan Berjangka Komoditi ini oleh banyak orang. Banyak orang berfikir bursa berjangka sama dengan bursa efek, padahal banyak perbedaan dari kedua bursa tersebut. Kedua, didasari oleh perusahaan pialang berjangka yang notabene perusahaan swasta dan dapat dipastikan akan meraup keuntungan sebesar-besarnya, pada akhirnya di dalam menjaring nasabah tidak melihat latar belakang dari nasabah tersebut sehingga nampak asal-asalan baik itu calon nasabah seperti yang disyaratkan di dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi itu sendiri atau melanggar ketentuan calon nasabah yang diharuskan. Ketiga, sudah menjadi hukum alam sebagai perusahaan swasta memiliki tenaga marketing untuk memasarkan dan memperkenalkan produknya namun tenaga marketing dari perusahaan pialang ini sendiri tidak mengerti lebih dalam mengenai apa itu bursa berjangka apa itu perdagangan berjangka komoditi begitu pula karena keterbatasan perusahaan pialang yang menyalurkan pengetahuan kepada tenaga marketingnya sehingga ilmu dan pengetahuan yang diperoleh pun tidak maksimal. Keempat, barang yang diperdagangkan dalam bursa berjangka itu sendiri merupakan barang komoditi yang berasal dari pertanian, perkebunan, kehutanan atau pun pertambangan, namun pengawasannya berdiri sendiri, seperti kementerian Pertanian, perkebunan, kehutanan dan juga pertambangan itu dengan kementerian perdagangan terpisah. Hal ini pulalah yang menghambat tujuan awal adanya bursa berjangka yaitu adanya “price discovery” dimana harga tercipta karena adanya pertemuan antara permintaan dan penawaran, bukan malah menentukan harga dengan mengikuti harga komoditi di luar seperti mengikuti harga Kopi Brazil dijadikan patokan harga. Seharusnya harga komoditi tercipta secara alami, karena adanya pemisahan sendiri oleh kementerian-kementerian ini menjadikan harga yang terbentuk memang sengaja ditentukan padahal komoditi andalan Indonesia begitu banyak.<sup>12</sup>*

Menurut narasumber yaitu kepala bagian Pelanggaran Transaksi dan juga kepala bagian Pelanggaran Administratif, hambatan-hambatan yang dijabarkan tersebut yang selama

---

<sup>11</sup> Veri Aggrijono, Kabag Pelanggaran Transaksi, BAPPEBTI, wawancara tanggal 17 September 2012 9:05 WIB, data primer telah diolah.

<sup>12</sup> Muallim Syuib, Kabag Pelanggaran Administratif, BAPPEBTI, wawancara tanggal 17 September 2012 15:54 WIB, data primer telah diolah.

ini membuat pengawasan dari BAPPEBTI kurang optimal. Hal tersebut pula yang membuat pialang-pialang berjangka menyalahgunakan kedudukannya terutama di dalam menyalahgunakan dana nasabah. Di dalam mengatasi hambatan tersebut, BAPPEBTI mencoba mencari solusi dan melakukan beberapa upaya.

Kegiatan pengawasan merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan salah satu tindakan yang harus dilaksanakan dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum yang telah ada.<sup>13</sup> Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah penegakan hukum dari Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi beserta peraturan pelaksanaannya yang mengalami hambatan di dalam proses penegakan hukumnya. Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.<sup>14</sup>

BAPPEBTI melakukan pengawasan pun tidak selancar seperti apa yang diharapkan agar mencapai penegakan hukum yang optimal. Seringkali hambatan-hambatan dihadapi oleh BAPPEBTI selaku badan pengawas kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Menurut penulis, hambatan yang dihadapi BAPPEBTI, diantaranya :

- a. Kurang tahunya masyarakat mengenai kegiatan perdagangan berjangka komoditi dan badan pengawas kegiatan perdagangan komoditi yaitu BAPPEBTI.
- b. Adanya benturan kewenangan di dalam melakukan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dengan BAPPEBTI. Ketika sebuah perkara telah ditangani dan telah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, BAPPEBTI tidak berhak lagi melakukan tindakan awal. Tindakan yang dapat dilakukan oleh BAPPEBTI hanyalah tindakan lanjutan dari penyidikan.
- c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia di dalam tim penyidik, pemeriksa, dan pengawas.
- d. Adanya tenaga marketing dan pialang yang kurang jeli di dalam melihat latar belakang calon nasabah ketika menjaring para calon nasabah.
- e. Kurangnya pengetahuan para tenaga marketing perusahaan pialang terhadap kegiatan perdagangan berjangka komoditi sehingga penyampaian informasi terhadap calon nasabah tidak lengkap dan tidak jelas.

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal 1.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, **Sistem Peradilan di Indonesia**, <http://sudiknoartikel.blogspot.com/> Serial Online 24 Maret 2008, diakses tanggal 19 November 2012 pukul 17: 18 WIB

#### **C.4 Solusi untuk mengurangi / menghilangkan hambatan tersebut.**

Di dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BAPPEBTI dalam melakukan pengawasan terhadap pialang berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah, beberapa upaya telah dilakukan. Upaya yang dilakukan BAPPEBTI adalah mencoba mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggar-pelanggar tersebut melalui ancaman pencabutan, pembekuan, penyidikan. Selain itu mengusahakan meminta pada biro kepegawaian untuk mengalokasi Sumber Daya Manusia dan memberdayakan penyidik khusus hanya berada di biro hukum. Kedua, BAPPEBTI melakukan sosialisasi dalam rangka memperkenalkan Perdagangan Berjangka Komoditi ini kepada masyarakat yang kurang mengetahuinya. Selain itu, di dalam pembentukan Peraturan Pemerintah yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi itu sendiri harus dibenahi lagi dan dalam penyusunannya akan melibatkan perusahaan pialang untuk memberikan saran yang secara langsung mengetahui proses yang sebenarnya di lapangan. Terkait dengan penyidikan, sudah ada pembagian yang jelas antara hal-hal yang menjadi kewenangan BAPPEBTI maupun kepolisian itu sendiri. Jika kasus yang dilaporkan murni kasus penipuan akan ditangani oleh pihak kepolisian, sedangkan jika kasus yang dilaporkan merupakan pelanggaran di bidang industri perdagangan berjangka komoditi akan ditangani oleh BAPPEBTI yang lebih berwenang dan menguasai materi yang ada. Dalam rangka perlindungan terhadap dana nasabah, semenjak adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, BAPPEBTI melakukan sebuah upaya yaitu adanya kewajiban bagi pialang berjangka untuk melakukan pemisahan rekening. Pemisahan rekening ini bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana nasabah yang seringkali terjadi meskipun hingga tahun 2011 masih terjadi tindakan menyalahgunakan dana nasabah. Dari adanya pemisahan rekening perusahaan pialang berjangka tersebut, diharapkan akan mengurangi resiko yang lebih besar atas adanya penyalahgunaan dana nasabah dibandingkan apabila tidak ada rekening terpisah (*segregated account*).

#### **PENUTUP**

Pengawasan dapat dilakukan dari berbagai segi, baik dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan atau pun segi saat/waktu dilaksanakannya. Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI dalam rangka mengawasi tindakan pialang berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah dalam hal ini dilakukan dari segi waktu dilaksanakannya, yaitu pengawasan secara preventif dan juga pengawasan secara represif dimana keputusan-keputusan badan-badan yang bertingkat lebih rendah akan dicabut

kemudian apabila bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan umum. Pengawasan tersebut diantaranya :

### 1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif dilakukan dengan cara diantaranya :

- a. Pelatihan Teknis
- b. Kepatuhan Keuangan
- c. Evaluasi Laporan Direktur Kepatuhan
- d. Audit Pelaku Usaha
- e. Pengawasan Dan Evaluasi Transaksi Pelaku Usaha
- f. Evaluasi Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka

### 2. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI tidak hanya secara preventif, namun juga secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Pengawasan represif yang dilakukan dalam pemeriksaan dilakukan dengan *Standard Operating Procedure*. Sebagai salah satu cara untuk lebih meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap PBK, secara konsisten BAPPEBTI terus berupaya melakukan penegakan hukum terhadap para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum dimaksud, BAPPEBTI memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, serta *undercover* atau penyamaran terhadap para pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tentang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya. Sedangkan pengawasan secara represif dilakukan pula dengan adanya pengenaan sanksi terhadap pelanggaran. Tindakan dari BAPPEBTI sebagai badan pengawas memberi peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin usaha, dan denda merupakan bentuk pengawasan secara represif

Beberapa kasus pelanggaran yang telah terjadi haruslah menjadi pusat perhatian dari para pengawas yang mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi ini terutama dalam hal tindakan pialang berjangka yang melakukan penyalahgunaan dana nasabah di rekening terpisah. Berikut tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pengawas kegiatan perdagangan berjangka komoditi yaitu BAPPEBTI, antara lain :

1. BAPPEBTI lebih proaktif lagi di dalam memperkenalkan kegiatan perdagangan berjangka komoditi ini terhadap masyarakat dan lebih tegas di dalam memberikan sanksi kepada pialang berjangka yang melakukan tindakan menyalahgunakan dana nasabah hal ini terkait dengan tujuan awal adanya pemisahan rekening adalah sebagai bentuk perlindungan bagi dana nasabah dalam rangka meminimalisir adanya penyalahgunaan.

2. Memperluas jangkauan BAPPEBTI, memperbanyak perpanjangan tangan BAPPEBTI di daerah-daerah setidaknya di tiap ibu kota provinsi atau setiap pulau.
3. Pembagian kewenangan secara tegas diantara dua institusi, yaitu BAPPEBTI dan juga Kepolisian agar tidak terjadi benturan yuridis perihal pemeriksaan dan penyidikan.
4. Terkait terbatasnya Sumber Daya Manusia, alangkah lebih baiknya ada penjaringan khusus tim penyidik, pemeriksa, dan pengawas dengan mengadakan pelatihan khusus atau pendidikan khusus terhadap tenaga baru atau pun lama agar lebih expert (ahli).
5. Beberapa pialang atau pun tenaga marketing yang menjaring calon nasabah kurang melihat latar belakang calon nasabahnya, sebaiknya BAPPEBTI mengatur lebih lanjut hal yang berkaitan seperti membuat aturan mengenai standar minimal calon nasabah. Begitu pula diterapkan di dalam merekrut seorang tenaga marketing, haruslah dilakukan seleksi yang ketat dan perusahaan pialang itu sendiri diwajibkan memiliki aturan mengenai standar minimal tenaga marketing. Perusahaan pialang melakukan kegiatan pelatihan khusus terhadap calon tenaga marketing yang akan dipekerjakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEBTI Kementerian Perdagangan Republik Indonesia BAPPEBTI/Ar/44/V/2012, *Annual Report 2011*, BAPPEBTI.go.id. diakses tanggal 25 Juli 2012 19.50
- Dian Ediana. **Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia**. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. 2008.
- Jusuf Anwar, **Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi**. PT. Alumni. Bandung. 2008.
- Lie Ricky Ferlianto, dkk. **Komoditi Investasi Paling Prospektif**, Elex Media Komputindo. Jakarta. 2006.
- Muallim Syuib. Kabag Pelanggaran Administratif. BAPPEBTI. wawancara tanggal 17 September 2012 15:54 WIB, data primer telah diolah.
- Penjelasan Undang-undang No. 32 Tahun 1997 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- PT. Saint Technologies Indonesia. **Menuju Perdagangan Komoditi Online**. Percetakan El-Syarif. Jakarta. 2011.
- Satjipto Rahardjo. **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Sudikno Mertokusumo. **Sistem Peradilan di Indonesia**. <http://sudiknoartikel.blogspot.com/> Serial Online 24 Maret 2008. diakses tanggal 19 November 2012 pukul 17: 18 WIB
- Undang-Undang No. 32 tahun 1997 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Veri Aggrijono. Kabag Pelanggaran Transaksi, BAPPEBTI. wawancara tanggal 17 September 2012 9:05 WIB, data primer telah diolah.